

LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA INDONESIA

Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas mahasaraswati Denpasar
e-mail: ibbrata@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to examine the history of the formulation of Pancasila into a basic principle of state philosophy and unifying the nation. The method used is literature study, which is a series of activities to find, read, record, review the reports, and library materials that contain theories relevant to the problems in revealing past events. The results show that the independence achieved by the Indonesian people is not a gift from the Netherlands or Japan. Independence is achieved through a long struggle full of twists and turns with the sacrifice of property, soul, and body. On 17-08-1945 is the culmination of the nation's struggle. De facto independence is not enough, support and international recognition (de jure) is needed. One of the conditions to be recognized by the international community, that the independent state is obliged to have the Basic of State and the Constitution of the State. The formulation of Pancasila as the candidate for State Base started through the session of BPUPKI. The proposed candidate for Basic State has been submitted by the figures in front of the first trial of BPUPKI. At the second session delivered the results of the formulation of Pancasila by the Committee of nine, commonly known as the Jakarta Charter. The structure of Pancasila, especially the first precepts in the Jakarta Charter, is proposed to be replaced, thus becoming "Belief in the One Supreme". The 1945 Constitution and Pancasila were passed by the PPKI to become the State Basis, unifier and house with the Indonesian nation.

Keywords: Pancasila, Unifier, BPUPKI, PPKI

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengkaji sejarah perumusan Pancasila menjadi azas dasar falsafah negara dan pemersatu bangsa. Metode yang digunakan adalah studikepustakaan, yaitu rangkaian kegiatan mencari, membaca, mencatat, menelaah laporan-laporan, dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam mengungkapkan peristiwa masa lampau. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda ataupun Jepang. Kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang penuh liku-liku dengan pengorbanan harta benda, jiwa, dan raga. Pada 17-08-1945 merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa. Kemerdekaan secara *de facto* belum cukup, dukungan dan pengakuan dunia internasional (*de jure*) sangat dibutuhkan. Salah satu syarat untuk diakui oleh dunia internasional, bahwa negara merdeka itu wajib memiliki Dasar Negara dan UUD Negara. Perumusan Pancasila sebagai calon Dasar Negara dimulai melalui sidang BPUPKI. Usulan calon Dasar Negara telah disampaikan oleh tokoh-tokoh dihadapan sidang pertama BPUPKI. Pada sidang kedua disampaikan hasil rumusan Pancasila oleh Panitia sembilan yang lazim dikenal sebagai Piagam Jakarta. Susunan Pancasila, terutama sila pertama dalam Piagam Jakarta diusulkan

untuk diganti, sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUD 1945 dan Pancasila disahkan oleh PPKI menjadi Dasar Negara, pemersatu, dan rumah bersama bangsa Indonesia

Kata kunci: Pancasila, Pemersatu, BPUPKI, PPKI

PENDAHULUAN

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila merupakan karunia yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber cahaya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun peradaban bangsanya di masa-masa selanjutnya. Dalam membangun bangsa, Pancasila merupakan sumber energi sebagai kekuatan dan sekaligus sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, menjadi alat pemersatu membangun kerukunan berbangsa, dan sebagai pandangan hidup sehari-hari bagi bangsa Indonesia

Sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa, Pancasila selalu diuji ketahanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang multikultural seperti Indonesia. Sejak disahkannya sebagai azas dan landasan negara, mulai dari jaman awal kemerdekaan, jaman Orla, Orba, dan bahkan sampai dewasa ini, Pancasila selalu menarik untuk dibicarakan. Ini berarti bahwa semakin penting sebuah peristiwa maka semakin tinggi nilai simboliknya, sehingga semakin terbuka dan semakin

menarik untuk diperdebatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi dewasa ini, terutama pasca pilkada serentak tahun 2017 ini. Dalam kontestasi Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017, semua kontestan peserta pemilu dengan calonnya masing-masing berusaha dan berjuang keras untuk memenangkan calon yang diusungnya.

Dalam memenangkan calon yang diusungnya terkadang sering melampaui prinsip-prinsip berdemokrasi. Pelaksanaan pemilu yang seharusnya diwujudkan berdasarkan demokrasi konstitusional, namun yang terjadi kemudian adalah demokrasi identitas, politisasi agama, etnis, ekonomi, dan sebagainya. Akibatnya persatuan dan kesatuan yang telah cukup lama dirajut oleh komponen bangsa ini akhirnya mengalami sebuah distorsi yang sangat mengkhawatirkan. Pancasila yang telah disepakati sebagai jati diri bangsa seakan-akan kembali dipersoalkan. Pancasila yang merupakan budaya bangsa yang dibangun dari mosaik keberagaman kebudayaan bangsa yang begitu indah, seperti digugat dan dipersoalkan kembali oleh kelompok-kelompok tertentu

matahari di bulan Juni 1945, 72 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenegaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, seakan-akan kehilangan daya perekatnya.

Penentuan siapa yang merumuskan pertama Pancasila mungkin akan dengan mudah memancing perdebatan. Di antara elemen-elemen (oknum) yang secara terus menerus menggugat berpendapat bahwa penggali Pancasila adalah Mr. Muh. Yamin, dengan alasan bahwa tiga hari sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Mr. Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 telah menyampaikan suatu pidato yang memuat kelima sila tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa yang lahir pada 1 Juni 1945 adalah nama Pancasila, alasannya bahwa kelima sila itu sesungguhnya sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa ini ada, sehingga tidak mungkin lagi dikenali hari lahirnya. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa Mr. Muh. Yamin dan Mr. Soepomo adalah penggali Pancasila, alasannya kedua tokoh ini telah menyampaikan lima pokok pikiran di depan sidang BPUPKI. Selain itu bahkan ada yang berpendapat bahwa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan pidato penutup, yang tidak lain sebagai

rangkuman pidato yang diucapkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, oleh karena itu

pidato Bung Karno merupakan hasil kompilasi dari tiga hari sidang sebelumnya.

Namun yang harus disadari bahwa Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang calon dasar negara (Pancasila) itu adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Suatu pertanyaan yang senantiasa dilontarkan, namun tetap saja menarik yaitu mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan yang sekaligus dapat menunjukkan eksistensinya dari guncangan kisruh politik di negara ini? Jawabannya karena Pancasila itu merupakan media pemersatu bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat terbuka mengikuti perkembangan jaman.

PEMBAHASAN

I. Kebangkitan Nasionalisme Sejak jaman kerajaan dan masuknya agama-agama besar di nusantara, unsur-unsur Pancasila sebagai kebudayaan Indonesia sudah ada dalam kehidupan masyarakat, terutama yang terkait dengan sistem kepercayaan. Kehadiran pengaruh budaya luar pada waktu itu berjalan secara damai, tanpa intimidasi apalagi melalui kekerasan, sehingga hubungan di antara kedua budaya

itu terjalin dan dapat berlangsung secara harmonis.

Pada masa kerajaan Majapahit cukup banyak karya sastra bernilai tinggi berhasil diciptakan. Di antara sekian banyak karya sastra, ada dua buah karya sastra yang sangat terkenal kala itu yaitu: kitab *Negarakertagama* yang dikawi oleh Mpu Prapanca, dan kitab *Sutasoma* yang dikawi oleh Mpu Tantular. Dalam buku *Negarakertagama* terdapat istilah “*Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasankar bhisekaka Krama*”, artinya raja wajib menjalankan dengan setia kelima pantangan begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. Sementara dalam kitab *Sutasoma* terdapat istilah “*Pancasila Krama*”, artinya lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. *Pancasila Krama* ini juga sering disebut “*Ma Limo*”, mencakup: 1) Dilarang mateni (membunuh); 2) Dilarang maling (mencuri); 3) Dilarang madon (berzina); 4) Dilarang mabok (minum-minuman keras) dan; 5) Dilarang main (berjudi). Kelima ini menjadi pedoman tingkah laku yang wajib ditaati.

Hadirnya bangsa Barat (Belanda) pada akhir abad XVI di nusantara sebagai bangsa penjajah, membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Pada permulaan abad XX di panggung politik internasional terhadap Dunia Timur terjadi dua peristiwa

penting. *Pertama*, hampir seluruh negara

negara di kawasan Asia telah dikuasai oleh bangsa Eropa seperti: Malaysia, Singapura, dan India oleh bangsa Inggris, Philipina oleh bangsa Spanyol, Kamboja, Laos, dan Vietnam (Indocina) oleh bangsa Prancis, Indonesia oleh Belanda. *Kedua*, pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan ditandai timbulnya suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri seperti: Republik Philipina yang dipelopori Joze Rizal (1898), kemenangan Jepang atas Rusia (1905), Republik Cina (1911) oleh Sun Yat Sen. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa ini sangat besar pengaruhnya terhadap pergolakan kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional melalui organisasi pergerakan “Budi Utomo” (1908) yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama muridnya Dr. Sutomo.

Timbulnya gerakan nasional tidak dapat dipisahkan dengan bangkitnya nasionalisme di Asia, yang dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme (penjajahan). Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme itu sesungguhnya adalah jawaban bangsa Asia termasuk bangsa Indonesia terhadap tantangan Barat. Artinya bahwa sejak kehadiran bangsa Barat di nusantara ini sesungguhnya telah terkandung sebuah niat/nafsu untuk menjajah dan mengeksploitasi, sehingga sejak saat itu

juga telah menimbulkan reaksi masyarakat setempat.

Reaksi bangsa Asia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat sesungguhnya ada dua bentuk: 1) *Zelotisme*, yaitu reaksi berupa menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh Barat atau yang lazim juga dikenal dengan istilah isolasi, yaitu bentuk perlawanan pasif dengan cara menolak segala pengaruh Barat. Contoh: gerakan Sanusi di Afrika Utara, gerakan Wahabi di Arabia, gerakan Swadessi di India; 2) *Herodianisme*, yaitu dengan cara membuka pintu selebar lebarnya bagi pengaruh Barat, meniru cara cara Barat dan apabila sudah kuat digunakan untuk menyerang imperialisme Barat. Reaksi seperti ini sering juga disebut sebagai bentuk perlawanan aktif, yaitu menentang pengaruh Barat dengan menggunakan alat-alat atau senjata dari Barat sendiri. Contoh: gerakan Mohammad Abduh di Mesir, Revolusi Turki, dan gerakan modernisasi Jepang pada jaman Meizi Tenno.

Bangkitnya nasionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia. Namun kalau dikatakan bahwa kebangkitan nasionalisme Indonesia akibat pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia (1905) dan gerakan Turki Muda (1908) sepertinya perlu dicermati secara hati-hati. Bila

kemenangan Jepang atas Rusia ditanggapi

sebagai batu dasar lahirnya kebangkitan bangsa kulit berwarna, maka kejadian lainnya harus juga diberikan proporsi yang seimbang. Penulis cenderung mengatakan bahwa kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah bentuk reaksi bangsa Indonesia sendiri akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial itu sendiri. Bibit bibit perlawanan bangsa Indonesia telah ditanam dan disemai oleh kolonial sendiri, sehingga tumbuh subur menjadi bentuk perlawanan. Reaksi-reaksi ini dilakukan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum tahun 1905, seperti perlawanan Sultan Agung Mataram (1645), Sultan Ageng Tirtayasa (1650), Iskandar Muda (1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (1670), Pattimura (1817), Diponegoro (1825-1830), Jagaraga (1849), dan masih banyak perlawanan lainnya yang mempunyai corak, ciri, bentuk sendiri. Sekali lagi menurut hemat penulis, bahwa kejadian-kejadian seperti kemenangan Jepang atas Rusia, Gerakan Turki Muda, dan kejadian-kejadian lainnya di luar Indonesia hanya merupakan faktor pendorong. Namun bagaimanapun besar dan kuatnya dorongan itu dilakukan, apabila di dalam hati sanubari orang-orang Indonesia tidak bergelora semangat perlawanan terhadap hegemoni kolonial, mungkin perlawanan itu lambat datangnya atau mungkin sama sekali tidak akan pernah terjadi perlawanan.

Ratu Wilhemina dengan jajaran pemerintahan kerajaan mengungsi ke

Inggris, sehingga pemerintah kerajaan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan Indonesia.

Janji-janji tentang sebuah negara merdeka yang pernah disampaikan pemerintah kerajaan Belanda merupakan sebuah strategi agar sistem pemerintahan yang sedang diterapkan di Indonesia kala itu tidak mendapat kesulitan. Janji Belanda tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di kelak kemudian hari hanyalah kebohongan belaka, karena tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, sebab sampai Belanda menyerah tanggal 10 Mei 1940 kepada Nazi Jerman, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang membom Pear Harbour salah satu pangkalan penting Amerika Serikat di Lautan Pasifik, yang memicu meletusnya perangpasifik. Dalam kurun waktu singkat Jepang telah berhasil menguasai negeri Cina, Philipina, dan termasuk Indonesia. Bangsa Jepang dengan gigih menghalau Belanda dan berhasil menguasai Indonesia sejak 9 Maret 1942. Jepang sangat menyadari bahwa menguasai Indonesia tidaklah mudah, mengingat wilayah nusantara ini telah cukup lama dikuasai oleh Belanda. Itu berarti budaya Barat (Belanda) di nusantara ini sudah cukup kuat pengaruhnya, untuk itulah Jepang harus bekerja ekstra keras untuk menarik

Organisasi Budi Utomo (20-5-1908) dipandang sebagai embrio gerakan nasional untuk mewujudkan suatu negara merdeka. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Organisasi Budi Utomo merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu bermunculan organisasi-organisasi pergerakan yang lain, seperti: Sarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1909, kemudian dengan cepat merubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun 1911, Indische Party (IP) tahun 1913, PKI tahun 1920, Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, Sumpah Pemuda (1928), dan begitu seterusnya saling bahu-membahu bermunculan organisasi pergerakan dengan tujuan kemerdekaan bagi bangsanya.

II. Perumusan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Perang Dunia II (1939-1945) yang melibatkan negara-negara sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Cina) dengan negara-negara Fasis (Jerman, Italia, dan Jepang) pecah. Negara Belanda diserbu oleh Nazi Jerman 5 Mei 1940 dan takluk 10 Mei 1940, yang mengakibatkan

propaganda dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Setiap hari radio Jepang mengumandangkan lagu “Indonesia Raya” dengan seruan: sambutlah saudara tua Dai Nipon, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan dengan tujuan menjajah, namun membantu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat (Belanda).

Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tipu muslihat yang dilancarkan oleh tentara Jepang sangat ampuh, di mana-mana rakyat Indonesia membantu Jepang mengalahkan dan sekaligus mengusir Belanda. Kepercayaan yang telah berhasil dibangun oleh Jepang menjadi modal utama untuk menggalang kekuatan dalam membantu Jepang dalam memenangkan peperangan Asia Timur Raya.

Bermodalkan kepercayaan, Jepang berhasil membentuk perkumpulan pemuda (Seinendan), pemudi (Fujinkai), tentara PETA, pasukan Jibaku-Tai dan lain-lain untuk menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan pihak sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Di samping itu Jepang juga telah berhasil meyakinkan bangsa

Indonesia yang mayoritas beragama Islam

bahwa mati dalam peperangan untuk membela tanah air adalah “suhada” (mati yang paling terhormat).

Dalam kenyataannya pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia ternyata jauh lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Akibat kekejaman Jepang, maka terjadi pemberontakan tentara PETA di Blitar (Jawa Timur). Rakyat Indonesia sangat kecewa akibat tipumuslihat Jepang. Akibatnya terjadilah perlawanan “bawah tanah” terhadap Jepang. Di sisi yang lain Jepang mulai terdesak oleh gempuran pihak sekutu. Kekecewaan yang dialami rakyat Indonesia dengan cepat dapat diketahui. Jepang sangat menyadari apabila kekecewaan itu tidak segera diatasi tentu akan merugikan perjuangannya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Untuk mengatasi kekecewaan itu Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan kelak dikemudian hari kepada bangsa Indonesia..

Menyikapi janji Jepang itu, ada dua pola sikap di kalangan para pejuang tanah air. Ada yang percaya akan janji Jepang tersebut, namun sebagian lagi meragukan akan kesungguhan janji itu. Bagi yang setuju tentu dengan segala upaya tetap komit membantu Jepang dalam peperangan melawan sekutu. Sementara yang meragukan, mereka beranggapan bahwa janji kemerdekaan itu tidak lebih hanya sebuah taktik Jepang untuk tetap

meraih simpati dan dukungan maksimal dari rakyat Indonesia dalam menghadapi pihak sekutu.

Sebagai tindaklanjut atas janji itu, terutama bagi mereka yang meragukan janji itu, kembali Jepang menegaskan bahwa seandainya janji itu direalisasikan apakah bangsa Indonesia sudah siap menjadi negara merdeka, merumuskan persyaratan yang dipenuhi bagi suatu negara merdeka, misalnya apakah sudah siap dengan dasar negara. Untuk menegaskan dan sekaligus sebagai bukti komitmen Jepang akan janji itu maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengemukakan akan membentuk “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia”(BPUPKI). Badan ini baru terbentuk tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945 kemudian mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 60 Orang dengan ketua Dr. Radjiman Widiadinigrat.

Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan diri menjadi negara merdeka, merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah negara merdeka. Hal yang pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI adalah permasalahan “Dasar Negara”. Sidang BPUPKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu: sidang pertama berlangsung tanggal

29 Mei sampai 1 Juni 1945, hasil sidang pertama ini akan dibahas dalam sidang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945.

Sidang BPUPKI pertama berlangsung selama empat hari, secara berturut-turut tiga tokoh yang tampil berpidato menyampaikan gagasan/usulan sebagai calon dasar negara. Pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya, tanggal 31 Mei 1945 pidato disampaikan oleh Mr. Soepomo, sementara pada hari terakhir tepatnya tanggal 1 Juni 1945 kesempatan diserahkan kepada Ir. Soekarno untuk menyampaikan pidato tentang rencana calon dasar negara.

Dalam pidatonya, Mr. Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan Dasar Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Pri Kebangsaan; 2) Pri Kemanusiaan; 3) Pri Ketuhanan; 4) Pri Kerakyatan (permusyawaratan dan perwakilan) dan; 5) Kesejahteraan Rakyat (Keadilan sosial). Isi pidato yang disampaikan Mr. Muh. Yamin terdiri dari lima usulan, namun dari kelima usulan tersebut Mr. Muh. Yamin tidak memberi nama atau istilah terhadap kelima usulan tersebut. Pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin juga menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI yang dimulai dengan kata pembukaan.

Berbeda dengan usulan yang disampaikan Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo memulai pidatonya dengan mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut: 1) Teori negara perseorangan (*individualis*). Menurut paham ini, negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*); 2) Paham negara kelas (*class theory*) yang sering disebut sebagai teori golongan. Menurut teori ini, negara adalah alat dari suatu golongan (suatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara kapitalis adalah alat bagi penguasa (kaum borjuis), oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh (*proletar*) dapat ganti menindas kaum borjuis. Selanjutnya dalam pidato tentang usulan rencana dasar negara, Mr. Soepomo menyampaikan lima usulan calon Dasar Negara yang terdiri dari: 1) Nasionalisme/internasionalisme; 2) Takluk kepada Tuhan; 3) Kerakyatan; 4) Kekeluargaan dan ; 5) Keadilan rakyat. Pada kesempatan ini, Mr. Soepomo walaupun dalam usulannya ada lima rancangan usulan, namun kelima usulan tersebut belum diberikan nama.

Usulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya disampaikan oleh Ir. Soekarno. Pidato Ir. Soekarno tentang usulan calon dasar negara

disampaikan secara lisan tanpa teks.

Ir. Soekarno mengusulkan Dasar Negara yang terdiri dari lima prinsip yang rumusannya sebagai berikut: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia); 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan); 3) Mufakat (demokrasi); 4) Kesejahteraan sosial; dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan).

Lima prinsip sebagai calon dasar negara yang telah disampaikan dalam pidato tersebut, oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Peserta sidang bertanya kepada Ir. Soekarno tentang asal-usul nama Pancasila yang diusulkan. Ir. Soekarno menjawab secara lugas, bahwa nama itu adalah atas saran salah seorang teman beliau yang ahli bahasa. Namun siapa ahli bahasa yang memberikan saran kepada Ir. Soekarno sampai dewasa ini belum ada yang mampu mengungkapkan.

Menurut Ir. Soekarno, kelima sila itu masih bisa diperas menjadi “Tri Sila”, meliputi: 1) Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesa dari “kebangsaan (nasionalisme) dengan peri kemanusiaan (internasionalisme); 2) Sosio Demokratis yang merupakan sintesa dari “mufakat” (demokrasi) dengan kesejahteraan sosial dan; 3) Ketuhanan. Selanjutnya Ir. Soekarno juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila”, yang intinya adalah gotong royong.

Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophische grondslag*) atau pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia sebagai *weltanschauung*, dan di atas dasar itulah didirikan negara Indonesia. Pidato Ir. Soekarno sangat menarik untuk disimak, *pertama* karena pidato itu disampaikan secara lisan yang membangun kesan bahwa apa yang disampaikan dalam sidang itu memang sudah disiapkan secara matang oleh Ir. Soekarno berdasarkan pengalaman selama memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsanya. *Kedua*, dalam pidato itu Ir. Soekarno juga membandingkan dasar filsafat negara “Pancasila” dengan ideologi-ideologi besar dunia yang lain, seperti: ideologi Liberalisme, Komunisme, Kosmopolitisme, San Min Chui, Chauvinisme dan lain-lainnya.

Pidato Ir. Soekarno yang disampaikan pada sidang pertama BPUPKI sangat menarik dicermati, sebab pidato tanggal 1 Juni 1945 itu hampir mirip dengan pidato yang disampaikan tanggal 4 Juli 1927 ketika Ir. Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh tokoh lainnya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Sebab Marhaenisme yang menjadi azas Partai Nasional Indonesia

adalah mencakup tiga azas yaitu: 1)

Ketuhanan; 2) Sosio Nasionalisme (Kemanusiaan dan Kebangsaan) ; 3) Sosio Demokrasi (Musyawarah = Demokrasi Politik dan Kesejahteraan Sosial = Demokrasi Ekonomi). Artinya tiga dari lima usulan calon dasar negara yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 sudah pernah disampaikan pada saat mendirikan PNI tanggal 4 Juli 1927. Sidang

BPUPKI ke dua dilanjutkan dengan agenda membahas pidato berkenaan dengan usulan calon asas dasar negara yang telah disampaikan oleh tiga tokoh sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pembahasan terhadap ketiga usulan calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI, namun telah ditetapkan sembilan tokoh yang dipercaya mampu mengemban tugas mulia itu. Kesembilan tokoh ini kemudian lebih dikenal dengan istilah “Panitia Sembilan”, terdiri dari : 1) Ir. Soekarno; 2) Drs. Moh. Hatta; 3) Mr. A.A. Maramis; 4) Abikoesno Tjokro soejoso; 5) Abdoel Kahar Muzakir; 6) Haji Agus Salim; 7) Mr. Ahmad Soebardjo; 8) K.H. WachidHasym dan ; 9) Mr. Muh. Yamin. Melalui rapat-rapat yang secara intensif dilakukan (14 – 16 Juli 1945), akhirnya Panitia Sembilan telah mencapai suatu hasil yang sangat baik yaitu suatu perumusan Pancasila, yang lazim dinenal dengan istilah “Piagam Jakarta”, yang susunannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan serta sistematika

Pancasila yang tertuang dalam Piagam

Jakarta dapat diterima oleh BPUPKI dalam sidang 14 – 16 Juli 1945.

Pancasila sebagai dasar negara belum final, karena BPUPKI belum merupakan perwakilan yang representatif. Oleh karena BPUPKI adalah sebuah badan hasil bentukan Jepang, sehingga dipandang belum mencerminkan perwakilan orang Indonesia. Untuk memenuhi kepentingan itu, maka harus segera dibentuk suatu panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus diumumkan akan dibentuk, 9 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai bekerja, Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Keanggotaan dari PPKI ini seluruhnya adalah terdiri dari

orang-orang Indonesia untuk memeriksa

hasil-hasil kerja BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan Indonesia nanti. Setelah kemerdekaan keanggotaan PPKI disempurnakan, sehingga menjadi Badan Nasional. Semula PPKI bertugas untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI, kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting yaitu:

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
2. Sebagai pembentuk negara (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17-18-1945).
3. Menurut teori hukum badan seperti ini mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental)(Darmodihardjo, 1989:31).

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Walaupun kekalahan Jepang ini sangat dirahasiakan, namun berkat kecerdasan dan ketangkasan para pemuda, terutama para pemuda yang bekerja di Kantor Berita, maka berita tentang kekalahan Jepang itu sampai juga ke telinga para pemimpin pergerakan Indonesia. Sementara itu pihak sekutu memberikan mandat kepada Inggris untuk melakukan pelucutan senjata kepada Jepang.

Mandat sekutu kepada Inggris tidak segera dilakukan, akibatnya terjadilah kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di Indonesia. Kekalahan Jepang atas sekutu dan kekosongan kekuasaan inilah yang dijadikan sebagai dasar alasan tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional Indonesia mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk sesegera mungkin memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya tepat pukul 10.00 pagi waktu Jakarta bertempat di Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” diumumkan oleh dwitunggal (Soekarno-Hatta) tanggal 17 – 8 – 1945 dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia.

Pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka secara internal (*de facto*) belum cukup. Karena wajib mendapat pengakuan dunia internasional (*de jure*). Agar mendapat pengakuan dunia internasional, maka perlu segera diambil tindakan-tindakan untuk menata Indonesia merdeka seperti: menetapkan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain alat kelengkapan negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, pagi hari sebelum sidang menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali (Sunda Kecil) untuk

merubah rumusan Sila pertama yang

berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya (tujuh kata)” diganti menjadi “Yang Maha Esa”.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Undang Undang Dasar, yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang rumusannya sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada waktu itu juga sudah memilih/menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga secara *de facto* dan secara *de jure* Indonesia sudah menjadi negara merdeka, dengan menempatkan Pancasila menjadi Dasar Negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Pancasila disepakati menjadi dasar negara paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama warga bangsa sebab keberagaman itu merupakan karunia, dan Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa selalu bersifat terbuka.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah

dari pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia;

- 2) Usulan calon dasar negara merdeka mulai dibicarakan melalui sidang BPUPKI. Usulan calon dasar negara diusulkan secara berturut-turut oleh: Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Usulan calon dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno diberi nama "Pancasila";
- 3) Usulan calon dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang pertama BPUPKI, selanjutnya akan dibahas dalam sidang kedua oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Pancasila Piagam Jakarta;
- 4) Sebelum Pancasila hasil kerja Panitia Sembilan disahkan, ada usulan agar rumusan sila pertama dirubah. Usulan tersebut disetujui, sehingga *Pancasila (Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis)*. Denpasar: Universitas Udayana.

Oesman, O. & Alfian. (1992). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.

bunyi rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya UUD 1945 dan Pancasila oleh PPKI disahkan menjadi Dasar Negara Indonesia, sebagai pemersatu bangsa yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, S. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Negara RI.
- Darmodihardjo, D. (1989). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Lab. Pancasila: IKIP Malang.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Notonegoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Soegito, H.A.T. (2002). *Peranan Pancasila di Era Reformasi (dipandang sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional)*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Soeprapto, S. (1997). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. LP3-UGM: Yogyakarta.
- Tim Dosen Pendidikan Pancasila (I Wayan Jendra, ed). (2002). *Pendidikan*

